

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses untuk mengembangkan kegiatan ekonomi di suatu negara, yang menyebabkan pendapatan per kapita meningkat sehingga tercapai tingkat kemakmuran yang tinggi (Yoertiara, 2022). Pada negara-negara berkembang, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi masih memiliki hambatan yaitu adanya masalah penduduk yang menjadi isu sentral. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa di negara-negara berkembang tingkat pertumbuhan penduduk relatif tinggi sementara lapangan kerja semakin terbatas, terjadinya kondisi ini akan berujung pada tingginya angka pengangguran (Hasballah, 2021).

Bangsa yang maju maupun yang sedang berkembang, menghadapi masalah pengangguran, tetapi penyebabnya berbeda. Di negara-negara yang sudah maju, masalah pengangguran muncul karena gangguan aktivitas ekonomi dan perdagangan, sedangkan di negara-negara yang masih berkembang, masalah pengangguran muncul karena kekurangan lapangan pekerjaan meskipun jumlah angkatan kerja yang kian bertambah (Limongan, 2001 dalam Lumula et al., 2025), Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pengangguran tidak dapat dilepaskan dari proses dan arah pembangunan ekonomi yang dijalankan oleh suatu Negara.

Pembangunan ekonomi adalah usaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, yang berarti bahwa hasil pembangunan harus didistribusikan secara merata dan adil kepada semua orang. Pembangunan

ekonomi dapat didefinisikan sebagai gerakan yang memiliki tujuan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat dan meningkatkan kesempatan kerja bagi para penganggur (Lumula et al., 2025). Pengangguran terjadi ketika ekonomi secara keseluruhan suatu negara tidak mampu menyediakan lapangan kerja untuk seluruh angkatan kerjanya, yang berarti bahwa orang yang tidak tertampung di lapangan kerja tersebut menjadi menganggur. Disini peran pemerintah dalam mengeluarkan terobosan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja sangat diperlukan (Hasballah, 2021).

Dalam konteks pembangunan ekonomi, pengangguran bukan hanya berdampak pada individu yang tidak bekerja, tetapi juga pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Seseorang yang menganggur tidak dapat berkontribusi optimal terhadap aktivitas produksi, sehingga output ekonomi menurun. Jika kondisi ini berlangsung secara masif dan berkelanjutan, maka kemiskinan menjadi konsekuensi logis dari tidak terserapnya tenaga kerja (Firmansyah, 2025). Pengangguran adalah kondisi ketika individu yang tergolong pada angkatan kerja berkeinginan untuk bekerja, tetapi belum berhasil memperoleh pekerjaan (Lestari, 2023 dalam Daud et al., 2025). Pengangguran muncul disebabkan keseluruhan ekonomi di suatu negara belum sanggup menyiapkan lowongan pekerjaan bagi keseluruhan angkatan kerja yang tersedia, Hal ini menjadikan mereka yang tidak terserap menjadi tidak memiliki pekerjaan dan menjadi pengangguran (Hasballah, 2021).

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang sedang fokus menurunkan tingkat pengangguran terbuka di setiap wilayah, termasuk daerah-daerah yang masih tertinggal maupun yang sudah maju. Meskipun berbagai program dan kebijakan telah diterapkan oleh pemerintah guna menanggulangi

masalah pengangguran, kenyataannya angka pengangguran masih menunjukkan gejala yang cukup mengkhawatirkan dari waktu ke waktu (Lestari, 2013 dalam Daud et al., 2025).

Pengangguran adalah sebuah ancaman bagi sumber daya ekonomi dan dapat dianggap sebagai kerugian kesejahteraan, serta mengurangi potensinya sebagai pemicu ketidakstabilan sosial dan politik. Dengan jumlah yang signifikan, persentase angkatan kerja yang tidak terpakai menyebabkan total output berada di bawah kemampuannya, yang mengakibatkan biaya yang muncul dalam bentuk hilangnya output (Suparman et al., 2024). Tingkat Pengangguran Terbuka di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan bahwa permasalahan pengangguran tidak hanya terjadi pada wilayah tertentu saja, melainkan hampir seluruh wilayah di Indonesia menghadapi tantangan yang serupa. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengangguran merupakan persoalan struktural yang bersifat nasional, meskipun dengan tingkat dan karakteristik yang berbeda di setiap daerah.

Tabel 1. 1 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Pulau di Indonesia tahun 2015-2024 (Dalam Persen)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sumatera	6,43	5,25	5,12	5,06	4,97	6,17	5,69	6,17	6,03	4,75
Jawa	6,51	5,92	6,04	5,85	5,69	8,16	6,45	6,45	5,87	5,35
Bali & Nusa Tenggara	3,84	3,03	2,69	2,61	2,66	4,71	4,05	3,74	2,88	2,51
Kalimantan	5,56	5,54	5,16	4,79	4,60	5,39	5,34	4,83	4,56	4,42
Sulawesi	6,08	3,85	4,57	4,14	4,00	4,94	4,43	3,73	3,64	3,65
Maluku	7,99	5,53	7,31	5,79	5,75	6,36	6,36	5,43	5,31	5,07
Papua	6,04	5,41	5,06	4,73	4,97	5,54	4,59	5,59	4,10	4,20

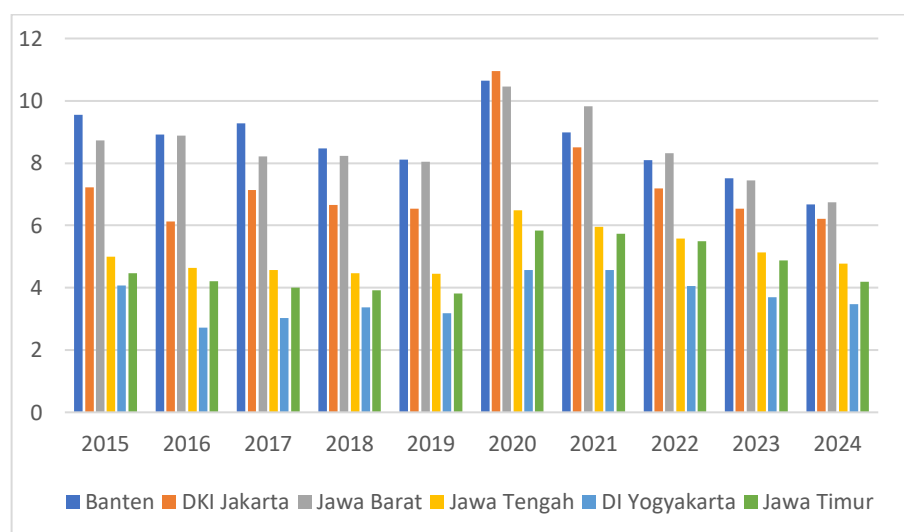
Sumber : BPS Provinsi di Pulau Jawa, diolah (2026)

Berdasarkan tabel 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut pulau di Indonesia periode 2015-2024, dapat dilihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka di berbagai wilayah di Indonesia menunjukkan perbedaan antarwilayah. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, penyerapan tenaga kerja dan masih banyak lagi faktor lainnya. Dapat dilihat juga dalam table tersebut bahwa Pulau Jawa secara umum menunjukkan angka TPT yang relatif lebih tinggi dibandingkan sebagian besar pulau lainnya, dengan lonjakan signifikan pada tahun 2020 sebesar 8,16 persen dan kemudian kembali menurun secara bertahap hingga 5,35 persen pada tahun 2024. Pulau Sumatera juga mengalami fluktuasi yang cukup nyata, sedangkan Bali dan Nusa Tenggara cenderung memiliki tingkat TPT yang lebih rendah meskipun sempat meningkat pada masa pandemi. Kalimantan dan Sulawesi menunjukkan tren yang relatif lebih stabil, sementara Maluku dan Papua memperlihatkan dinamika yang cukup beragam dari tahun ke tahun. Perbedaan ini mencerminkan adanya variasi kondisi pasar tenaga kerja dan karakteristik perekonomian di masing-masing wilayah.

Tingginya tingkat pengangguran di Pulau Jawa yang terlihat dari tabel 1,1 di atas menjadi perhatian penting mengingat wilayah ini merupakan pusat konsentrasi penduduk dan aktivitas ekonomi nasional. Namun demikian, adanya perbedaan di setiap provinsi terjadi karena masing-masing daerah memiliki kondisi ekonomi, struktur lapangan usaha, serta karakteristik ketenagakerjaan yang tidak sama. Seperti yang dikemukakan oleh (Lumula et al., 2025), bahwa pengangguran merupakan salah satu permasalahan ketenagakerjaan yang masih menjadi tantangan utama pembangunan ekonomi di Indonesia, terutama di Pulau Jawa yang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan konsentrasi penduduk terbesar. Adanya

Pengangguran bukan hanya di ruang lingkup nasional saja, tetapi terjadi pula pada ruang lingkup regional seperti di Provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa. dan berdasarkan publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada provinsi di pulau jawa ini dapat dilihat secara lebih rinci serta dalam beberapa tahun terakhir, seperti yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka pada Provinsi di Pulau Jawa tahun 2015-2024 (Dalam Persen)



Sumber : BPS Provinsi di Pulau Jawa, diolah (2026)

Berdasarkan gambar 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka pada Provinsi di Pulau Jawa, terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) di enam provinsi di Pulau Jawa tahun 2015-2024 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada Tahun 2015, TPT tertinggi ada pada Provinsi Banten yang mencapai angka 9,55%, dan diikuti oleh Jawa Barat dengan angka 8,72%, serta DKI Jakarta dengan angka 7,23%. Pada 2020 sebagian besar provinsi menunjukkan kenaikan tajam yang diduga sebagai dampak perlambatan ekonomi akibat pandemic Covid-19, seperti Provinsi Banten yang mengalami lonjakan tertinggi yaitu di angka 10,81%, dan DKI

Jakarta dengan angka 10,46%. Namun kemudian berangsur menurun pada tahun-tahun berikutnya. Pada Gambar tersebut juga dapat dilihat bahwa tiga Provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten memiliki tingkatan yang cukup tinggi dibandingkan dengan tiga Provinsi lain, hal ini mencerminkan tingginya tekanan pasar kerja di wilayah dengan konsentrasi industri dan urbanisasi yang besar. Sementara itu, Di Provinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur relatif memiliki tingkat pengangguran yang lebih rendah, meskipun tetap mengalami dinamika kenaikan dan penurunan. Pola ini menunjukkan bahwa meskipun Pulau Jawa merupakan pusat pertumbuhan ekonomi nasional, permasalahan pengangguran masih menjadi tantangan serius dan memiliki karakteristik yang berbeda antarprovinsi, sehingga memerlukan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih spesifik dan berbasis pada struktur ekonomi masing-masing daerah, khususnya sektor industri yang mempunyai peranan penting dalam pembentukan struktur ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, pertumbuhan sektor industri di setiap provinsi menjadi aspek penting untuk diperhatikan untuk menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka di Tingkat daerah seperti Pulau Jawa.

Dalam sistem pemerintahan daerah, pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari adanya peningkatan produksi barang dan jasa yang diukur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan melakukan analisis melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan sektor ekonomi yang berpotensi menurunkan tingkat pengangguran di suatu wilayah dapat teridentifikasi. Daerah yang memiliki sektor unggulan dengan pertumbuhan relatif tinggi cenderung mengalami perkembangan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan wilayah lainnya. Pertumbuhan tersebut selanjutnya dapat

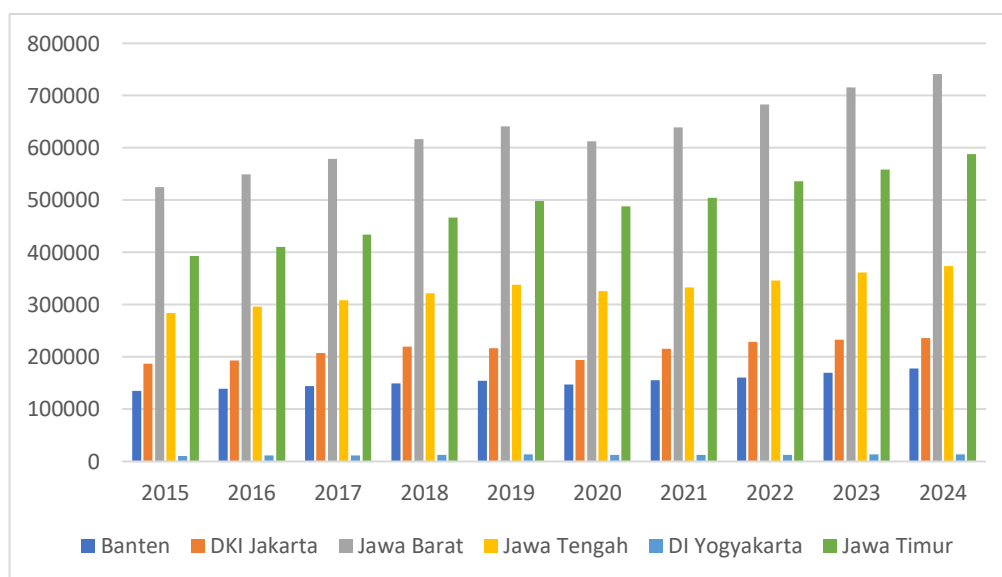
mendorong aktivitas ekonomi di wilayah sekitarnya. Dengan demikian, sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan lebih besar umumnya menjadi prioritas untuk dikembangkan karena mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja sehingga dapat menurunkan Tingkat Pengangguran (Lumula et al., 2025).

Lajunya pertumbuhan industri akan mendorong adanya pelebaran kesempatan kerja dan menurunkan jumlah pengangguran yang pada nantinya berpotensi meningkatkan pendapatan serta permintaan masyarakat. Adanya peningkatan dan daya beli itu memperlihatkan bahwa perekonomian tersebut tumbuh dan sehat. Hubungan antara aktivitas pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja terlihat jika terdapat pertumbuhan ekonomi maka menyebabkan adanya peningkatan aktivitas perekonomian, dan berbanding terbalik (Soesatyo, 2017). Secara teori semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu sektor, maka semakin tinggi pertumbuhan kesempatan kerja sektor tersebut. Dengan kata lain hubungan sektor industri dengan penyerapan tenaga kerja sangat erat sekali. Semakin baik meningkat pertumbuhan sektor industri, maka semakin meningkat jumlah penyerapan tenaga kerja dan jumlah pengangguran akan menurun (Badan Pusat Statistik, 2025).

Menurut (Badan Pusat Statistik, 2025), Industri manufaktur memiliki peranan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2023, industri manufaktur masih menjadi tulang punggung ekonomi nasional, dengan kontribusi mencapai 18,67 % terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebesar Rp 20.892,4 triliun. Sebagai sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), industri manufaktur tidak hanya menciptakan nilai tambah dari proses pengolahan bahan mentah menjadi produk

jadi, tetapi juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta mendorong perkembangan sektor-sektor lainnya. dan untuk memperkuat pernyataan tersebut, maka disajikan data pertumbuhan sektor industri sebagai gambaran empiris mengenai perkembangan sektor ini di wilayah pulau jawa selama periode 2015-2024.

Gambarr 1.2 PDRB Sektor Industri Manufaktur Menurut Lapangan usaha tahun 2015-2024 (Miliar Rupiah)



Sumber: BPS Provinsi di Pulau Jawa, diolah (2026)

Berdasarkan Gambar 1.2, dapat dilihat bahwa PDRB Sektor Industri Manufaktur pada Provinsi di Pulau Jawa menunjukkan tren pertumbuhan yang cenderung meningkat selama periode 2015-2024. Jawa Barat merupakan provinsi dengan nilai PDRB industri tertinggi, yang meningkat dari 524.466,68 pada tahun 2015 menjadi 741.041,45 pada tahun 2024. Jawa Timur juga memperlihatkan perkembangan yang signifikan dengan kenaikan dari 393.272,95 menjadi 588.589,26 pada periode yang sama. DKI Jakarta dan Banten menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil dan terus meningkat, meskipun nilainya masih

berada di bawah Jawa Barat dan Jawa Timur. Sementara itu, Jawa Tengah mengalami peningkatan bertahap, dan DI Yogyakarta memiliki nilai paling rendah dibandingkan provinsi lainnya, namun tetap menunjukkan tren kenaikan yang konsisten. Secara keseluruhan, data tersebut menggambarkan bahwa aktivitas industri manufaktur di Pulau Jawa terus berkembang dan terkonsentrasi pada provinsi-provinsi dengan basis industri yang kuat. Kondisi ini menunjukkan besarnya potensi sektor industri manufaktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta membuka peluang penyerapan tenaga kerja sehingga Tingkat pengangguran terbuka pada Provinsi di Pulau Jawa bisa menurun.

Meningkatnya output pada sektor industri Manufaktur akan meningkatkan output perekonomian, yang digambarkan dengan semakin tingginya PDRB. Meningkatnya PDRB, dengan kata lain pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan membawa peningkatan kapasitas produksi pada perekonomian. Karenannya pembangunan ekonomi perlu memprioritaskan pembangunan pada sektor yang dapat mengurangi pengangguran. Namun faktanya kebijakan negara berakibat pada kelompok masyarakat yang terperangkap dalam kemelaratan, ketidakberdayaan dan tidak adanya akses kepada sumber daya alam, pekerjaan, sarana dan prasarana sosial ekonomi dan ketimpangan ekonomi yang terjadi pada kondisi yang sangat mengkhawatirkan (Hasballah, 2021). Keberlanjutan Pertumbuhan perekonomian akan berkelanjutan apabila inovasi dalam pengelolaan sumber daya terus dilakukan. Kondisi ini tidak terlepas dari peranan industrialisasi di berbagai sektor ekonomi daerah. Penerapan industrialisasi dalam pengelolaan sumber daya dapat mendorong peningkatan output produksi sekaligus menciptakan peluang kerja tambahan, sehingga berimplikasi pada penurunan tingkat pengangguran (Qushoy et al., 2022).

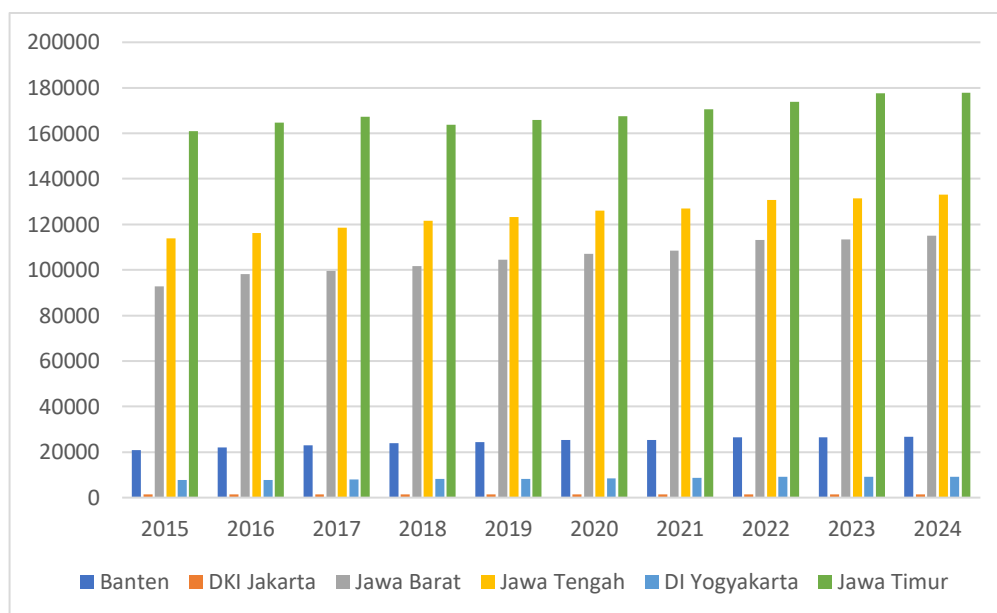
Menurut (Garcia-Milà and McGuire, 1994) Kontribusi sektor industri Manufaktur sangat mempengaruhi nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB singkatnya merupakan jumlah dari seluruh hasil produksi dalam kurun waktu satu tahun yang dihasilkan oleh suatu daerah. Dimana pada prinsip makro, jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan harus sama dengan penyerapan yang digunakan masyarakat. Sektor industri merupakan sektor yang sangat berperan dalam pembangunan ekonomi karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun meskipun terjadi transformasi struktural akibat pesatnya perkembangan sektor industri, Sektor Pertanian juga memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ketenagakerjaan, terutama di daerah dengan karakteristik agraris.

Sektor pertanian adalah sektor yang menyerap tenaga kerja terbanyak di Indonesia, diikuti oleh sektor industri pengolahan yang menyumbang sekitar belasan persen tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian tetap dijadikan prioritas oleh masyarakat Indonesia sebagai Upaya untuk mencari pekerjaan. Kondisi mayoritas wilayah Indonesia yang berada di pedesaan juga mendukung penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Tingkat pendidikan yang rendah di kalangan masyarakat Indonesia sebagai negara berkembang membuat sektor pertanian tetap diminati oleh mereka (Sitepu et al., 2024).

Peran penting sektor pertanian dalam ekonomi nasional adalah karena kontribusinya yang besar dalam mengurangi jumlah penduduk miskin, seperti yang terjadi pada pulau jawa, dimana pulau jawa merupakan pulau yang memiliki kontribusi paling besar dibandingkan dengan pulau lain. Hal ini dicapai melalui penerimaan tenaga kerja yang meluas dan sumbangan tambahan devisa bagi negara. Perkembangan sektor pertanian di Indonesia dan juga pada tingkat

regional seperti pulau jawa dan pulau lainnya bisa dioptimalkan dengan menggunakan pencapaian pembangunan yang telah ada hingga saat ini. Kemajuan pembangunan daerah dapat dievaluasi dengan melihat pertumbuhan ekonomi, perubahan struktur ekonomi, serta ketimpangan pendapatan di antara penduduk, antar wilayah, dan antar sektor (Khan et al., 2020 dalam Sitepu et al., 2024). Laju pertumbuhan sektor pertanian pada provinsi dipulau jawa dapat dilihat pada data dibawah ini.

Gambar 1.3 PDRB Sektor Pertanian pada Provinsi di Pulau Jawa tahun 2015-2024 (Miliar Rupiah)



Sumber : BPS Provinsi di Pulau Jawa, diolah (2026)

Berdasarkan gambar 1.3 mengenai data PDRB Sektor Pertanian pada Provinsi di Pulau Jawa tahun 2015-2024 yang diukur melalui data PDRB sektor pertanian menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan, terlihat bahwa seluruh provinsi menunjukkan tren peningkatan yang stabil dari tahun ke tahun. Jawa Barat merupakan provinsi dengan nilai PDRB pertanian tertinggi, yang

meningkat secara signifikan dari 524.466,68 pada tahun 2015 menjadi 741.041,45 pada tahun 2024, menunjukkan peran penting sektor pertanian di wilayah tersebut. Jawa Timur juga memperlihatkan perkembangan yang cukup signifikan dengan kenaikan dari 393.272,95 menjadi 588.589,26 selama periode penelitian, mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang konsisten. Jawa Tengah mengalami pertumbuhan bertahap dari 284.306,59 menjadi 373.849,72, mencerminkan bahwa sektor pertanian masih memiliki peran yang sangat penting dalam struktur perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

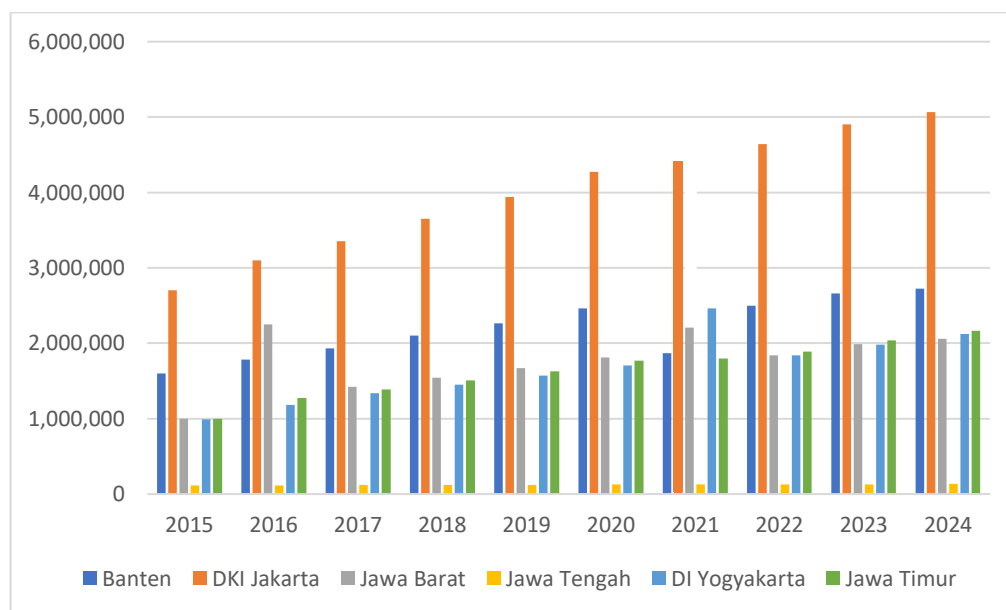
Sementara itu, provinsi dengan nilai yang relatif lebih kecil seperti Banten dan DI Yogyakarta tetap menunjukkan peningkatan yang konsisten. Banten mengalami kenaikan dari 20.743,47 pada tahun 2015 menjadi 26.703,40 pada tahun 2024, sedangkan DI Yogyakarta meningkat dari 10.693,04 menjadi 13.929,58. DKI Jakarta juga mengalami kenaikan dari 18.680,72 menjadi sekitar 23.5646,00 meskipun kontribusinya relatif terbatas karena struktur ekonominya lebih didominasi sektor non-pertanian. Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian di Pulau Jawa tetap berkembang secara positif, meskipun tingkat dan kontribusinya berbeda antarprovinsi sesuai dengan karakteristik dan struktur ekonomi masing-masing daerah.

Selanjutnya faktor lain yang dapat mengurangi tingkat pengangguran yaitu upah, upah merupakan hal utama dalam ketenagakerjaan, karena tujuan dari seseorang bekerja adalah untuk mendapatkan upah yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk itu salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran adalah dengan memperbaiki sistem upah melalui kebijakan upah minimum, penerapan kebijakan upah minimum merupakan usaha dalam rangka meningkatkan upah perkapita pekerja

sehingga upah rata-rata tenaga kerja dapat meningkat, peningkatan upah ini berpotensi menurunkan tingkat pengangguran dikarenakan adanya kebijakan yang menaikkan upah dapat mempengaruhi dan menarik minat seseorang untuk bekerja (Basri & Putra, 2021).

Menurut (Nailufar et al., 2024), Upah minimum atau yang dalam Tingkat provinsi biasa disebut dengan upah minimum provinsi (UMP) merupakan suatu standar minimum yang ditentukan oleh pemerintah dan digunakan oleh para pengusaha atau pelaku usaha untuk memberikan upah untuk para pekerja. Upah Minimum Provinsi Adalah aspek yang mempengaruhi Tingkat Angkatan kerja dan masalah pengangguran pada tingkat provinsi. Tren peningkatan Tingkat upah dapat meningkatkan minat pencari kerja terhadap jaminan upah dari perusahaan, tetapi keadaan ini juga bisa berbanding terbalik dengan dunia usaha, karena kenaikan upah minimum di atas harga pasar dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Peningkatan ini menyebabkan banyak pengusaha yang melakukan PHK dan angka pengangguran pun dapat meningkat. Upah minimum Adalah batas gaji yang ditetapkan oleh pemerintah untuk para pekerja, kebijakan terkait upah minimum dapat berdampak pada tingkat pengangguran karena keputusan bisnis dalam merekrut dan mempertahankan karyawan dapat dipengaruhi oleh kebijakan tersebut (Wasi'aturohmah et al., 2025).

Gambar 1.4 Upah Minimum Provinsi (UMP) pada Provinsi di Pulau Jawa tahun 2015-2024 (Juta Rupiah)



Sumber : BPS Provinsi di Pulau Jawa dan sumber lain, diolah (2026)

Berdasarkan data Upah Minimum Provinsi (UMP) pada provinsi di Pulau Jawa tahun 2015-2024 yang disuguhkan, dapat dilihat bahwa secara umum UMP di seluruh provinsi mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Provinsi dengan nilai UMP tertinggi selama periode tersebut adalah DKI Jakarta, yang meningkat secara signifikan dari sekitar Rp 2,7 juta pada tahun 2015 menjadi sekitar Rp 5,067 juta pada tahun 2024. Sementara itu, Banten juga menunjukkan peningkatan yang cukup konsisten dari Rp 1,6 juta menjadi sekitar Rp 2,727 juta. Di sisi lain, provinsi Jawa Barat sempat mengalami fluktuasi, namun pada tahun 2021 terjadi kenaikan yang cukup signifikan hingga mencapai sekitar Rp 4,416 juta, sebelum kembali mengalami penyesuaian secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya.

Provinsi lain seperti DI Yogyakarta dan Jawa Timur juga menunjukkan tren peningkatan UMP yang relatif stabil sepanjang waktu, mencerminkan adanya pertumbuhan ekonomi yang konsisten di wilayah tersebut. Jawa Tengah memiliki nilai UMP yang paling rendah dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, namun tetap menunjukkan kenaikan secara bertahap dari tahun ke tahun, walaupun peningkatannya lebih lambat dibandingkan provinsi lain. Secara keseluruhan, peningkatan UMP di berbagai provinsi di Pulau Jawa mencerminkan upaya pemerintah dalam menyesuaikan tingkat upah dengan kondisi ekonomi serta kebutuhan hidup layak masyarakat di masing-masing daerah. Perbedaan besaran UMP antar provinsi juga menunjukkan adanya variasi kondisi ekonomi, biaya hidup, dan produktivitas di setiap wilayah, yang pada akhirnya dapat memengaruhi dinamika pasar tenaga kerja, termasuk tingkat pengangguran, penyerapan tenaga kerja, dan mobilitas tenaga kerja antar daerah.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sektor industri manufaktur, sektor pertanian, dan upah minimum provinsi berpengaruh dan dapat menurunkan tingkat pengangguran terbuka. seperti penelitian yang dilakukan oleh (Daud et al., 2025) mengenai Pengaruh Kinerja Sektor Pertanian, Industri dan Pariwisata terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Gorontalo menyatakan bahwa sektor pertanian dan sektor industri memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kinerja kedua sektor tersebut dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja sehingga mampu menurunkan tingkat pengangguran. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fitri & Satrio, 2019) yang meneliti hubungan pertumbuhan sektor pertanian terhadap pengangguran di Indonesia, yang menyatakan bahwa pertumbuhan sektor pertanian memiliki hubungan

negatif terhadap pengangguran, sehingga peningkatan pertumbuhan sektor pertanian dapat menurunkan tingkat pengangguran. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Suparman et al., 2024) juga menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki peran penting dalam mengurangi pengangguran dan ketimpangan pendapatan di wilayah pedesaan di Indonesia.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhani & Ananda, 2024) yang meneliti pengaruh dari upah minimum provinsi terhadap tingkat pengangguran, menyatakan bahwa upah minimum provinsi memiliki pengaruh negatif signifikan yang artinya dapat mengurangi Tingkat pengangguran, kemudian penelitian menurut (Maulana et al., 2022), yang meneliti tentang pengaruh upah minimum dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka, Menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh negative signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan upah minimum dapat mengurangi tingkat pengangguran.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan adanya pengaruh dari sektor industri manufaktur, sektor pertanian, dan upah minimum provinsi terhadap tingkat pengangguran terbuka, namun penelitian tersebut umumnya terbatas pada jumlah provinsi tertentu, periode data yang lebih pendek, atau hanya menganalisis sebagian dari variable secara terpisah, dan dengan adanya kekosongan ini, maka peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan menganalisis tiga variable tersebut secara simultan menggunakan data panel enam Provinsi di Pulau Jawa selama periode 2015-2024. Dengan demikian penelitian ini tidak hanya memperbarui cakupan data dan periode analisis, tetapi juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara

pertumbuhan ekonomi, kebijakan upah, dan pengangguran di wilayah dengan aktivitas ekonomi terbesar di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti memutuskan untuk mengambil judul “**Pengaruh Sektor Industri Manufaktur, Sektor Pertanian, dan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka pada Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2015-2024**”. Pemilihan Provinsi di Pulau Jawa sebagai objek penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah ini merupakan pusat pertumbuhan ekonomi nasional dengan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar di Indonesia. Selain itu, Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk dan angkatan kerja terbesar dibandingkan wilayah lainnya. Oleh karena itu, kondisi dan perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Jawa penting untuk dianalisis, karena dapat mencerminkan sejauh mana pertumbuhan sektor-sektor ekonomi, dan kebijakan upah mampu mengurangi jumlah pengangguran di wilayah dengan aktivitas ekonomi tertinggi di Indonesia.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang di rumuskan oleh penulis di penelitian ini adalah:

1. Apakah Sektor Industri Manufaktur Berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Provinsi di Pulau Jawa tahun 2015 - 2024 ?
2. Apakah Sektor Pertanian Berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Provinsi di Pulau Jawa tahun 2015 - 2024 ?
3. Apakah Upah Minimum Provinsi (UMP) Berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Provinsi di Pulau Jawa tahun 2015 - 2024 ?
4. Apakah Sektor Industri Manufaktur, Sektor Pertanian dan Upah Minimum Provinsi (UMP) Berpengaruh secara simultan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Provinsi di Pulau Jawa tahun 2015 - 2024 ?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Menganalisis Pengaruh Sektor Industri Manufaktur terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Provinsi di Pulau Jawa tahun 2015 - 2024.

2. Untuk Menganalisis Pengaruh Sektor Pertanian terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Provinsi di Pulau Jawa tahun 2015 - 2024.
3. Untuk Menganalisis Pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Provinsi di Pulau Jawa tahun 2015 - 2024.
4. Untuk Menganalisis Pengaruh Sektor Industri Manufaktur, Sektor Pertanian dan Upah Minimum Provinsi (UMP) secara simultan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Provinsi di Pulau Jawa tahun 2015 - 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Sebagaimana yang telah disebutkan di bagian tujuan, maka manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya kajian ilmu ekonomi pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan Sektor Industri Manufaktur, Sektor Pertanian, dan Upah Minimum Provinsi serta pengaruhnya terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Provinsi di Pulau Jawa. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik yang sama.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman peneliti mengenai pengaruh Sektor Industri Manufaktur, Sektor Pertanian, dan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Provinsi di Pulau Jawa.

2) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi mahasiswa, khususnya di bidang Ekonomi Pembangunan, dalam memahami pengaruh Sektor Industri Manufaktur, Sektor Pertanian dan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dengan topik yang berkaitan.

3) Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan Lembaga Pendidikan Universitas Bojonegoro, khususnya dalam memperkaya kajian akademik, menambah literatur dan referensi ilmiah di lingkungan Fakultas Ekonomi.

1.5 Batasan Penelitian

1. Ruang lingkup wilayah penelitian dibatasi pada enam provinsi di Pulau Jawa, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten. Pemilihan wilayah tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Pulau Jawa merupakan pusat kegiatan ekonomi di Indonesia dengan konsentrasi penduduk, aktivitas industri, dan pasar tenaga kerja yang tinggi

sehingga relevan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

2. Periode dan jenis data penelitian dibatasi pada tahun 2015-2024 dengan menggunakan data panel yang merupakan gabungan antara data runtut waktu (*time series*) selama sepuluh tahun dan data antarwilayah (*cross section*) dari enam provinsi di Pulau Jawa. Penggunaan data panel bertujuan untuk menggambarkan perkembangan variabel penelitian dari waktu ke waktu sekaligus menangkap perbedaan karakteristik antarprovinsi.
3. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan sumber resmi lainnya. Data tersebut meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan sektor industri manufaktur dan sektor pertanian, data Upah Minimum Provinsi (UMP), serta data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selama periode 2015-2024.
4. Ruang lingkup analisis penelitian dibatasi pada pengaruh Sektor Industri Manufaktur, Sektor Pertanian, dan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada enam provinsi di Pulau Jawa. Analisis dilakukan pada tingkat provinsi dengan menggunakan data tahunan selama periode 2015–2024, sehingga penelitian difokuskan pada hubungan antarvariabel dalam lingkup wilayah dan periode tersebut.